

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan lebih mendalam tentang teori-teori yang menjadi dasar dari pokok permasalahan yang diamati. Selain itu akan dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

2.1. Kemiskinan

2.1.1. Konsep dan Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Fenomena seperti ini biasa terjadi dikarenakan rendahnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok baik papan, sandang, maupun pangan dan juga rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan dan standar pendidikan. Masalah kemiskinan sering terjadi di negara berkembang yang memiliki tingkat penduduk yang tinggi sehingga terjadi ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang dapat memicu ketimpangan sosial.

Menurut Chambers (1998) dalam Wini (2010:24-25), kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1) Kemiskinan (*proper*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

2) Ketidakberdayaan (*powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situas-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya.

4) Ketergantungan (*dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau

penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

5) Keterasingan (*isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Masalah kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup beberapa hal sebagai berikut (wikipedia) :

- 1) Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- 2) Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam

masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

- 3) Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

2.1.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, BPS (2007:54-55) menggunakan tiga indikator kemiskinan, yaitu 1. *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. 2. *Poverty Gap Index* (Indeks Kedalaman Kemiskinan) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. 3. *Poverty Severity Index* (Indeks Keparahan Kemiskinan) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Dari ketiga pendekatan tersebut Mudrajad (2006:115) menyatakan bahwa cara yang paling sederhana untuk mengukur kemiskinan adalah dengan ukuran *Head Count Index*.

Di samping itu, untuk mengukur tingkat kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per orang per hari. Sedangkan untuk kebutuhan minimum bukan makanan

meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa lainnya. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pada umumnya terdapat dua indikator utama untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Menurut Nurkse, indikator kemiskinan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu (Lincoln Arshad, 1999) :

1) Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2) Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis

kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

Menurut Sajogyo dalam Mudrajad (2006:118-119), ukuran kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan. Seseorang dikatakan miskin apabila konsumsi per kapita setara dengan 20 kg beras untuk daerah pedesaan dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan. Namun ukuran kemiskinan Sajogyo mendapatkan banyak dikritik karena hanya mengandalkan pada satu harga (harga beras), di mana beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia sehingga untuk keluarga miskin porsinya akan menurun secara cepat.

2.1.3. Penyebab Kemiskinan

Masalah kemiskinan yang terjadi antar suatu daerah dengan daerah lain pasti berbeda. Biasanya faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan meliputi faktor ekonomi, faktor sosial, faktor struktural (politik), dll. Kemiskinan identik dengan negara yang sedang berkembang, di mana permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan negara sedang berkembang sulit untuk maju. Menurut Todaro dan Smith (2006), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang diakibatkan karena interaksi antara 6 karakteristik berikut yaitu:

- 1) Tingkat pendapatan nasional di negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- 2) Pendapatan per kapita di negara berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
- 3) Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata.
- 4) Mayoritas penduduk di negara berkembang harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut.
- 5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.
- 6) Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan dan kurang memadai.

Sementara itu menurut Sharp, et.al (1996: 173-191) dalam Mudrajad (2006:120) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi :

- 1) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berdampak pada

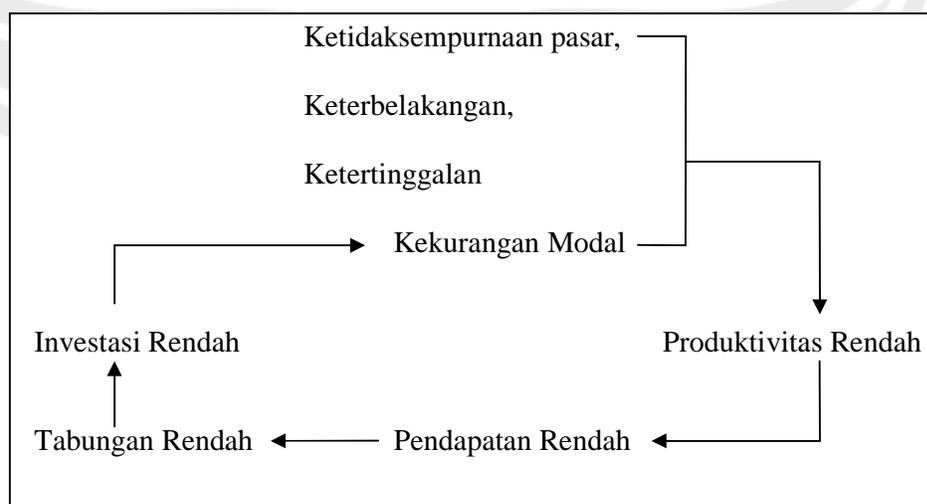
produktivitas yang rendah, dan kemudian mengakibatkan upah yang diterima juga rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.

3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse, yang mengatakan: “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

Gambar 2.1

Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse



Sumber : Mudrajad, 2006

2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*). IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu:

- a) Dimensi umur panjang dan sehat.
- b) Dimensi pengetahuan.
- c) Dimensi kehidupan yang layak (BPS, 2012).

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

Menurut Badan Pusat Statistik (2007), IPM merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM

terdiri dari tiga indeks dasar yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Rumus perhitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut :

$$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$$

di mana :

$X_{(1)}$ = Indeks harapan hidup

$X_{(2)}$ = Indeks pendidikan

$X_{(3)}$ = Indeks standar hidup layak

Menurut Todaro (2000) dalam Sukmaraga (2011:36), pembangunan manusia merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.2. PDRB per kapita

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Boediono, 1999:1). Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat diukur dengan pertumbuhan PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB per kapita didapatkan dari hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah.

Menurut Todaro (1997) dalam Wini (2010:47), PDRB per kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan masyarakat di daerah. Tingkat kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan kemampuan pendapatan, akan tetapi juga berhubungan dengan pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah.

BPS (2012), menjelaskan bahwa dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di suatu wilayah maka akan diperoleh angka PDRB per kapita. Secara sistematis, PDRB per kapita dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$$

2.2.3. Belanja publik

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, belanja pemerintah terbagi menjadi dua bagian yaitu belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Belanja pelayanan publik adalah bagian belanja yang berupa belanja admisnistrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal atau pembangunan yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Namun sejak tahun 2007, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, komposisi belanja berubah menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian belanja yang terkait langsung dengan pelayanan publik adalah belanja langsung.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan antara IPM dengan Tingkat Kemiskinan

Kualitas pembangunan manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan nasional untuk pembangunan ekonomi. Penekanan terhadap pentingnya kualitas pembangunan manusia menjadi suatu kebutuhan karena dengan sumber daya yang unggul akan menghasilkan seluruh tatanan kehidupan yang maju diberbagai bidang baik sosial, ekonomi, lingkungan, sehingga kualitas manusia memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengolahan pembangunan wilayahnya.

Untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dapat dilihat dari capaian angka IPM. Angka IPM terdiri dari tiga komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup layak. Jadi setiap kabupaten/kota yang memiliki angka IPM yang mendekati angka 100 maka pembangunan manusia yang ada di daerah tersebut semakin baik, sedangkan daerah yang memiliki angka IPM yang mendekati nol maka daerah tersebut memiliki pembangunan manusia yang buruk Adapun kategori tersebut sebagai berikut (BPS,2001) :

- a) Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- b) Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9

c) Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9

d) Rendah : IPM kurang dari 50,0

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah selanjutnya akan berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Selanjutnya dengan rendahnya pendapatan akan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Menurut Todaro (2006:436-438), modal manusia (pendidikan dan kesehatan) berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan. Peningkatan kesehatan dan pendidikan dapat membantu keluarga untuk keluar dari jebakan lingkaran setan kemiskinan, karena dengan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan lebih mudah dicapai.

Menurut Susiati (2012:24), kemampuan untuk keluar dari kemiskinan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Apabila kualitas sumber daya manusia tinggi, yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi akan menyebabkan produktivitas yang tinggi sehingga tingkat pendapatanpun menjadi meningkat. Tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan yang tinggi juga akan tercermin pada IPM yang tinggi. Oleh karena itu upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia baik dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terus dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

2.3.2. Hubungan antara PDRB per kapita dengan Tingkat Kemiskinan

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. PDRB per kapita sering dipakai untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Jika pendapatan per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah juga akan semakin meningkat. Ini berarti kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok di daerah tersebut akan semakin meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/menurun, maka akan menurun pula kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah tersebut. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin (Wini, 2010:40).

Menurut Sadono Sukirno (2000) dalam Sukmaraga (2011:36), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk terbatas,

maka akan banyak rumah tangga miskin yang terpaksa merubah pola hidupnya dengan beralih ke barang yang lebih murah.

Menurut Thamrin (2001) dalam Sukmaraga (2011:10), semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah yang dikarenakan semakin besarnya pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Hal ini juga berarti bahwa semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah, dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Menurut Todaro dan Smith (2006:234), tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan di suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka kemiskinan juga akan semakin luas.

2.3.3. Hubungan antara Belanja Publik dengan Tingkat Kemiskinan

Salah satu komponen utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah investasi pada sektor publik yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi tersebut dapat berupa belanja publik yang diarahkan pada sektor-sektor yang memenuhi kepentingan publik. Menurut Iradian (2005) dalam Susiati (2012:24) besarnya belanja publik pada sektor sosial (pendidikan, kesehatan, dan

perumahan) dan infrastruktur adalah penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. Hubungan antara belanja pada sektor sosial dan distribusi pendapatan adalah hal yang utama, dan investasi publik pada modal sumber daya manusia akan dapat mengefisienkan upaya untuk menurunkan ketimpangan pendapatan pada jangka panjang. Investasi publik pada infrastruktur dapat juga menjadi perhatian dalam usaha menurunkan tingkat kemiskinan.

Menurut World Bank (1993:21), belanja publik memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dengan mencakup tiga bidang anggaran pemerintah : (1) infrastruktur ekonomi dan layanan dukungan yang dirancang untuk meningkatkan peluang pendapatan orang miskin; (2) pelayanan sosial yang penting yang ditujukan untuk investasi sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin; (3) transfer sosial atau jaringan pengaman yang bertujuan untuk menambah konsumsi masyarakat miskin. Dalam rangka untuk mencapai masyarakat miskin secara efektif, maka pengeluaran publik di daerah-daerah perlu ditargetkan pada jasa atau barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin. Akan tetapi penargetan secara efisien juga mensyaratkan bahwa masyarakat miskin menggunakan sebagian besar dari layanan bersubsidi sehingga dapat meminimalkan kebocoran kepada masyarakat non-miskin.

2.4. Studi Terkait / Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terkait dengan masalah kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yang dilakukan oleh Susiati (2012). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2004-2010. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi (PDRB per kapita), belanja publik, dan akses air bersih. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan memilih model yang terbaik antara model *common effect*, *fixed effects*, dan *random effects*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa IPM, proposi belanja publik, dan akses air bersih berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DIY. Sedangkan PDRB per kapita tidak berpengaruh secara signifikan.

Wini (2010) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Pemekaran Tingkat Kabupaten (Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum Dan Sesudah Pemekaran di Kabupaten Nagekeo Propinsi NTT Tahun 2005-2009). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari terbitan BPS berbagai edisi. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah di sektor pembangunan, angka melek huruf, dan jumlah penduduk tanpa akses fasilitas kesehatan cenderung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin masyarakat pedesaan di Kabupaten Nagekeo. Sedangkan

variabel jumlah penduduk yang tidak mendapat akses air bersih dan pemekaran wilayah mempunyai pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagekeo.

Penelitian Tukuboya (2012), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara, 2006-2011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan serta angka partisipasi sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara. Sedangkan jumlah pengangguran berpengaruh positif, sementara angka partisipasi sekolah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.

Widiastuti (2010), mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004-2008. Tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, pendidikan, dan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Metode yang digunakan yaitu metode *Fixed Effect Model* (FEM), uji asumsi klasik, dan uji statistik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh negatif sedangkan jumlah

penduduk dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Penelitian Rusdarti dan Sebayang (2013), mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi terkait dengan data kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2007. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan pendekatan model regresi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif, sedangkan belanja publik mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah cenderung menurun dari tahun 2006 ke 2007.